



Jasiora : Vol 3 No 2 Juni 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngr/index>)



Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencetakan Sawah Baru (Studi Pada Kodim 0416/Bute)

Joko Susanto¹, Meli Manda Putri²

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: Josan161188@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, Email: melinda22@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 05 April 2019

Diterima: 24 Mei 2019

Terbit: 30 Juni 2019

Keywords:

TNI, Community
Empowerment, Printing new
fields.

Kata kunci:

TNI, Pemberdayaan
masyarakat, Pencetakan sawah
baru.

Corresponding Author:

Joko Susanto, E-mail:
Josan161188@gmail.com

Abstract

In accordance with the mandate of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, the Army has the authority to carry out Military Operations Other Than War (OMSP), one of the roles of the CSO is the assistance of the Army to the regional government in the new paddy field printing program. In carrying out its role it has not run as expected, this can be seen from the people who still complain about the role of the TNI which has not been maximized in empowering the community through the printing of new fields. The purpose of this study was to be able to find out the role of the Indonesian National Army in community empowerment through the printing of new fields. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the role of the Indonesian National Army in community empowerment through the printing of new paddy fields has been done well, it can be seen by taking steps in printing new rice fields by the TNI namely: 1) Identification of Prospective Farmers and Prospective Locations (CPCL), 2). Survey and Investigation, 3). Design, 4). Construction. In terms of resources owned by the TNI, it also strives to improve training in agricultural counseling of the Military District Military Command 0416 Bute, so that in carrying out its role in community empowerment through the printing of new fields it can be carried out as expected.

Abstrak

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satu peran dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah dalam program pencetakan sawah baru. Dalam melaksanakan perannya belum berjalan sesuai yang diharapkan, hal ini terlihat dari masyarakat yang masih mengeluhkan dari peran TNI yang belum maksimal dalam pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pencetakan sawah baru. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui Peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat

DOI : 10.5281/zenodo.3258016

melalui pencetakan sawah baru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru telah dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan langkah-langkah dalam mencetak sawah baru oleh TNI yaitu: 1). Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), 2). Survei dan Investigasi, 3). Desain, 4). Konstruksi. Dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh TNI juga mengupayakan untuk meningkatkan pelatihan dalam penyuluhan pertanian terhadap aparat TNI Kodim 0416 Bute, agar dalam melaksanakan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

1. Pendahuluan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyebutkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan Nasional, serta untuk menghindari adanya alih fungsi lahan pertanian dibentuklah lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional.

Hal ini sesuai dengan butir ketujuh Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Krisis pangan merupakan isu strategis dunia saat ini, ketidakseimbangan antara peningkatan populasi penduduk dengan ketersediaan lahan pemukiman memunculkan masalah yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan, sedangkan kebutuhan pangan meningkat tajam. Akibatnya lahan produktif yang seharusnya digunakan untuk lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non pertanian. Hal ini diiringi dengan masalah perubahan iklim yang berdampak terhadap menurunnya produktifitas dan menurunnya kualitas hasil panen.

Di Indonesia produksi pangan khususnya beras dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dalam produksi. Namun peningkatan tersebut tidak membuat harga pangan khususnya beras mengalami penurunan, bahkan Indonesia masih mengimpor beras dalam jumlah yang besar.¹ Pertimbangan tersebut menjadi alasan pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografi yang tersebar.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok Nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Ketahanan pangan sangat terkait dengan aspek kemiskinan. Kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, namun yang utama adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan bagi kehidupan yang layak. Sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Program pencetakan sawah baru merupakan program yang membantu kelompok tani yang berniat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan sawah. Tujuan dari program pencetakan sawah baru yaitu untuk perluasan areal tanam dan menambah baku lahan

¹ Istianingsih, N.2016. ”*Analysis of Rice Consumption and Rice Import in Indonesia*, Procceding miicema 2016. http://repository.unja.ac.id/166/1/MIICEMA_proceeding_2016.pdf

pertanian yang menjadi salah satu tuntutan pemerintah pusat untuk memperluas areal tanam guna mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) dan swasembada beras. Dalam hal ini, pemerintah membantu pendanaan pelaksanaan pembukaan lahan sawah dengan proses dan ketentuan yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan program ini dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian di daerah berusaha mencapai swasembada pangan melalui Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale), Untuk memperkuat Upsus Pajale ini dan dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan dewasa ini yang erat dengan perubahan yang signifikan, pemerintah melibatkan TNI AD khususnya kepada Bintara Pembina Desa (BABINSA) untuk mendukung kegiatan Upsus Pajale dalam hal penggunaan alat berat untuk mempercepat peningkatan produksi padi. Keterlibatan TNI AD dalam pencetakan sawah baru sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional, dilihat sebagai peran teritorial non perang dan berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan pemerintah. Peran operasi militer selain perang pada pencetakan sawah baru yaitu dalam upaya penguatan lembaga dan percepatan penyelesaian fisik di lapangan serta sebagai pendamping dan pengawalan dalam pencetakan sawah baru, program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana di bidang pertanian.

Program pencetakan sawah baru diharapkan dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibanding sebelum adanya program tersebut. Melalui program ini diharapkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, optimalisasi jam kerja, pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani. Selain itu peningkatan produksi beras merupakan salah satu tujuan pelaksanaan program pencetakan sawah baru, melalui program ini diharapkan dapat tercapainya swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Di samping Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta membantu tugas pemerintahan daerah yaitu membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tugas TNI AD sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (20) poin b mengenai operasi militer selain perang sub poin 9 yaitu “membantu tugas pemerintah di daerah “melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha membantu memenuhi pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk mencapai ketahanan pangan telah dilaksanakan. Sedangkan pasal poin d tugas TNI AD “melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat” dimaksudkan guna menangkal setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta menyiapkan potensi sumber daya alam khususnya logistik wilayah melalui salah satu program yang dilaksanakan antara lain pembinaan ketahanan pangan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi sasaran program pencetakan sawah baru, dengan jumlah luas lahan sawah 13.503 Ha, lahan bukan sawah seluas 3.700,28 Ha.² Hal ini mengingat masih banyaknya sawah yang terlantar dan menjadi lahan tidur yang dapat didayagunakan sehingga program ini sejalan dengan upaya untuk mendukung penyediaan pangan oleh pemerintah. Kabupaten Bungo juga memiliki luas lahan pertanian terbanyak di Jambi dan sektor pertanian merupakan

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, Tahun 2017.

sektor unggulan yang paling dominan mendukung pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang bisa diperoleh dari program cetak sawah di Kabupaten Bungo adalah meningkatkan rasio pemanfaatan tanah, mengurangi jumlah lahan terlantar, menambah luas areal tanam, meningkatkan produksi padi secara nasional, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah satu alasan mengapa Kabupaten Bungo menjadi sasaran dalam pencetakan sawah baru dikarenakan produksi padi di Bungo sangat mendukung pemenuhan kebutuhan beras di Provinsi Jambi. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan terus meningkatkan luas areal tanam padi dan produktifitas padi. Sementara luas tanam Kabupaten Bungo Oktober-Maret pada tahun 2016/2017 seluas 6.072 Ha (93,42%) dari target 6.500 Ha. Sementara untuk periode April-September 2017 telah terealisasi seluas 6.036 Ha (86,23%) dari target seluas 7.000 Ha.³

Berikut disajikan jumlah lahan sawah yang dicetak dengan bantuan TNI AD di Kabupaten Bungo Tahun 2016 dan 2017.

Tabel.1.

Luas lahan sawah yang dicetak oleh Petani dengan bantuan TNI AD
di Kabupaten Bungo
Tahun 2016

No	Nama Dusun	Luas Lahan		Jumlah Hasil Panen	Nama Kelompok Tani
		Sudah Ditanam	Yang tidak berhasil dicetak		
1	Lubuk Benteng	10 Ha	6 Ha	5,2 Ton/Ha	Perintis Jaya
2	Teluk Panjang	6 Ha	4 Ha	4,3 Ton/Ha	Belur Panjang

* Sumber : kodim 0416 bute 2018

Jumlah keseluruhan lahan yang dicetak oleh bantuan TNI AD tahun 2016 yaitu 26 Ha dengan jumlah lahan yang terealisasi berjumlah 16 Ha, sedangkan yang tidak terealisasi sejumlah 10 Ha. Lahan tersebut tidak terealisasi karena sawah tersebut setelah masa tanam, petani selanjutnya tidak merawatnya dan meninggalkannya begitu saja, sehingga lahan padi tersebut ditumbuhi oleh rumput liar dan pertumbuhannya pun terhambat.

Tabel. 2.

Luas lahan sawah yang dicetak oleh Petani dengan bantuan TNI AD
di Kabupaten Bungo
Tahun 2017

No	Nama Dusun	Kecamatan	Jumlah lahan yang dicetak	Nama kelompok tani
1.	Leban	Rantau Pandan	20 Hektar	Tanjung Pulai
2.	Timbolasi	Bathin III Hulu	12 Hektar	Apung Mudik
3.	Kara Apung	Bathin III Hulu	5 Hektar	Jaya Makmur

* Sumber : kodim 0416 bute

Jumlah keseluruhan lahan yang dicetak oleh bantuan TNI AD yaitu 37 Ha dan lahan tersebut sudah berhasil terealisasi. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, Tahun 2017

menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Kodim 0416/Bute, dalam rangka meninjau peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru masih belum optimal, hal ini dikarenakan:

1. Terbatasnya jumlah alat traktor yang digunakan untuk mencetak sawah baru.
2. Ketidakmauan petani untuk mengalih fungsikan lahan miliknya menjadi sawah.
3. Dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh TNI ketahui bahwa tidak semua TNI pernah mengikuti pelatihan dalam penyuluhan pertanian, hal ini tentu akan membatasi pengetahuan TNI dalam program pencetakan sawah baru.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru ?
2. Apa Hambatan-hambatan yang dihadapi TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru ?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan TNI untuk menghadapi hambatan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru ?

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan maksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi, kemudian menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur TNI dari Kodim 0416 dan anggota kelompok tani. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampling bertujuan (*Purposive Sampling*) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai berikut:

1. Perwira Seksi Teritorial (Pasiter)
2. Kepala Kelompok Tata Usaha Urusan Dalam (TUUD)
3. Kepala Seksi Operasional
4. Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas didusun Teluk Panjang dan Lubuk Benteng
5. 3 Orang anggota kelompok tani Dusun Teluk Panjang, Lubuk Benteng dan Leban
6. 2 Orang Rio Dusun Lubuk Benteng dan Leban
7. Ketua pemuda Dusun Leban

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pencetakan Sawah Baru.

Tentara Nasional Indonesia merupakan tiang penyangga kedaulatan Negara yang bertugas untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (20) poin b mengenai operasi militer selain perang sub poin 9 yaitu “membantu tugas pemerintah di daerah melalui fungsi utama pembinaan teritorial penyelenggaraan upaya dan usaha membantu memenuhi pangan sebagai

kebutuhan pokok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian untuk mencapai ketahanan pangan telah dilaksanakan. Dalam hal ini TNI berperan sebagai Motivator, Fasilitator dan Dinamisator bagi kelompok tani”.

Keterlibatan TNI AD dalam pencetakan sawah baru jelas diatur dalam Peraturan Presiden No.5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional, dilihat sebagai peran Operasi Militer Selain Perang dan berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan pemerintah. Langkah-langkah dalam mencetak sawah baru oleh TNI yaitu:

- a. Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
Identifikasi dilakukan berdasarkan data, informasi dan pengamatan lapangan yang bertujuan untuk menentukan lokasi perluasan sawah yang secara umum peruntukannya sesuai dengan dokumen tata ruang yang berlaku, standar teknis dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi diutamakan pada lahan dengan tingkat kesulitan terkecil.
- b. Survei dan Investigasi
Yaitu serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi perluasan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.
- c. Desain
Yaitu dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan perluasan sawah yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi pencetakan sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya.
- d. Konstruksi.
Kegiatan ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari mempersiapkan petani (sosialisasi, pendaftaran ulang petani, surat pernyataan kesanggupan petani) persiapan administrasi, hingga persiapan lapangan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru :

- a. Terbatasnya jumlah alat Traktor yang digunakan untuk mencetak sawah, hal ini diakibatkan karena sebagian besar dalam kondisi rusak, oleh sebab itu traktor tersebut memang perlu penambahan agar proses pencetakan sawah baru dapat cepat terlaksana. Berdasarkan penelitian di KODIM 0416 Bute, Traktor yang digunakan untuk Pencetakan Sawah Baru berjumlah 14 unit, hal ini mengindikasikan besarnya luas Pencetakan Sawah Baru, sehingga perlunya penambahan jumlah alat Traktor yang digunakan untuk mencetak sawah, mengingat luas lahan di Kabupaten Bungo masih memungkinkan untuk dilakukan Pencetakan Sawah Baru.
- b. Ketidakmauan petani untuk mengalih fungsikan lahan miliknya menjadi sawah, dari hasil penelitian bahwa ketidakmauan petani untuk mengalih fungsikan lahan miliknya menjadi sawah disebabkan karena mereka lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding dengan dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah tersebut.
- c. Dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh TNI diketahui bahwa tidak semua TNI pernah mengikuti pelatihan dalam penyuluhan pertanian, hal ini tentu akan membatasi pengetahuan TNI dalam Program Pencetakan Sawah Baru sudah cukup baik, namun memang perlu peningkatan, hal ini disebabkan karena TNI sudah memiliki bagiannya masing-masing dalam setiap tugasnya.

Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru :

- a. Dengan terbatasnya jumlah traktor yang ada untuk digunakan untuk mencetak sawah baru, maka upaya yang dilakukan adalah dengan meminjam traktor dari Dusun dan Dinas Pertanian.
- b. Agar petani mau mengalih fungsikan lahan miliknya menjadi sawah, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya meningkatkan ketahanan pangan, agar mereka para petani bisa lebih paham dan mengerti tentang pengetahuan pentingnya dalam meningkatkan ketahanan pangan.

- c. Dari sisi sumber daya manusia TNI juga harus diberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian, agar dalam melaksanakan peranannya bisa dilakukan dengan maksimal, maka dari itu perlu meningkatkan dengan memberikan pelatihan dalam bidang pertanian kepada anggota TNI yang terlibat dalam pencetakan sawah baru.

4. Kesimpulan

1. Peran TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pencetakan Sawah Baru sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan, karena TNI memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan khususnya untuk meningkatkan swasembada Beras guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, optimalisasi jam kerja, pemanfaatan lahan dan peningkatan pendapatan petani, walaupun sudah cukup baik, tetapi dalam melaksanakan perannya masih menemukan beberapa kendala atau hambatan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru yaitu:
 - a. Terbatasnya jumlah alat Traktor yang digunakan untuk mencetak sawah, hal ini diakibatkan karena sebagian besar dalam kondisi rusak.
 - b. Ketidakmauan petani untuk mengalih fungsikan lahan miliknya menjadi sawah disebabkan karena mereka lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding dengan dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah tersebut.
 - c. Dari sisi sumber daya yang dimiliki oleh TNI diketahui bahwa tidak semua TNI pernah mengikuti pelatihan dalam penyuluhan pertanian, disebabkan karena TNI sudah memiliki bagiannya masing-masing dalam setiap tugasnya
3. Upaya-upaya TNI dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pencetakan Sawah Baru adalah Menambah jumlah alat Traktor yang digunakan untuk mencetak sawah di Kodim 0416 Bute, Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya meningkatkan ketahanan pangan, dan meningkatkan pelatihan dalam penyuluhan pertanian terhadap aparat TNI Kodim 0416 Bute, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan TNI mengenai pencetakan sawah baru.

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada saran yang dapat peneliti sampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar TNI bisa menjadi penggerak dan motivator dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru yang lebih baik lagi, dengan mencari alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wadah atau saluran untuk menyampaikan informasi dari setiap program yang akan dilakukan oleh TNI AD bersama-sama pemerintah Daerah, diharapkan pelaksanaan kegiatan atau program tersebut dapat direalisasikan secara terus-menerus.
2. Keberhasilan program TNI AD akan dapat ditentukan oleh berbagai faktor di antaranya faktor pengembangan SDM personel TNI, disarankan hendaknya para pimpinan atau petinggi TNI AD dapat meningkatkan profesionalisme prajurit dalam Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT).
3. Peran TNI dalam pelaksanaan program ketahanan pangan melalui pencetakan sawah baru, diupayakan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan peningkatan swasembada pangan, hendaknya semua pihak dapat bekerjasama dengan TNI AD dalam mensukseskan program ini.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada LETKOL INF Wahyu Hadi Soenaryo, S.Sos selaku DANDIM 0416 BUTE dan seluruh personil DANDIM 0416 BUTE yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk memberikan data, informasi berkaitan penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua kawan-kawan

yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Agus Santoso & Tini Suhartini, (2007). *Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Abdulsyani, (2012). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Dendy Sugono, (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Istianingsih, N, (2016). "Analysis of Rice Consumption and Rice Import in Indonesia, Proceeding miicema 2016. http://repository.unja.ac.id/166/1/MIICEMA_proceeding_2016.pdf
- Inu Kencana Syafie, (2013). *Ilmu pemerintahan*, PT. Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafie & Welasari, (2017). *Ilmu Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Firdaus, (2012). *Manajemen Agribisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukino, (2016). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Totok Mardikanto & Poerwoko Soebioto, (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- T. Hani Handoko, (2011). *Manajemen*, edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara
- Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Peran Dan Tugas Perbantuan TNI Kepada Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Jurnal

- Sakai Yohanes, *Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, e-Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 2, 2015: 307-322, hal. 313.